SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/swadesi/
Swadesi. Mei, 2025, 1 (4), hlm 14-36
e-ISSN: 2774-2830, p-ISSN: 2774-2857

Peran ORIDA (*Oeang Repoeblik* Indonesia Daerah) dalam Perekonomian Masa Revolusi Fisik di Sumatera Selatan 1945-1949

Berlian Susetyo[1], Lagut[2], Rizal[3]

[1]Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Sumatera Selatan
[2]Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
[3]SMP Negeri 4 Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan
Email: [1]berlian.subkoss@gmail.com

Submit: *16/03/2025*
Revisi: *27/05/2025*
Diterima: *28/05/2025*
Terbit: 31/05/2025

Abstrak :

Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah sangat penting bagi masa perjuangan digunakan untuk logistik dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Penelitian ini membahas peran ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) dalam perekonomian Sumatera Selatan selama Revolusi Fisik 1945-1949. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis latar belakang penerbitan ORIDA serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan politik di Sumatera Selatan. Menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan moneter darurat yang diterapkan melalui ORIDA menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah keterbatasan distribusi mata uang dari Jawa ke Sumatera. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencetak mata uang sendiri, yang dilakukan oleh berbagai otoritas, baik sipil maupun militer. Beberapa entitas yang terlibat dalam penerbitan mata uang ini antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Karesidenan Palembang, dan Kewedanaan Lintang IV Lawang, serta pihak militer seperti Brigade Garuda Dempo dan Sub Teritorial Palembang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan ORIDA berperan penting dalam menopang perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan dinamika perjuangan ekonomi dalam menghadapi ketidakstabilan akibat perang dan tekanan dari pihak Belanda
Kata kunci: ORIDA, Perekonomian, Revolusi Fisik, Sumatera Selatan

***Abstract** :*

Currency as a legal means of payment was crucial during the struggle for independence, particularly for logistics in the physical revolution to defend sovereignty. This study examines the role of ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) in South Sumatra's economy during the Physical Revolution of 1945–1949. The main focus is to analyze the background of ORIDA's issuance and its impact on the economic and political conditions in South Sumatra. Using the historical research method, this study traces how the emergency monetary policy implemented through ORIDA became a key strategy in maintaining economic stability amid the limited distribution of currency from Java to Sumatra. Local governments were authorized to print their own currency, which was carried out by various authorities, both civil and military. Several entities involved in issuing this currency included the South Sumatra

Provincial Government, the Palembang Residency, and the Lintang IV Lawang District, as well as military units such as the Garuda Dempo Brigade and the Palembang Sub- Territorial Command. The findings of this study indicate that the issuance of ORIDA played a significant role in sustaining the regional economy while also reflecting the economic struggle dynamics in the face of instability caused by war and pressure from the Dutch.

Keywords: *ORIDA, Economy, Physical Revolution, South Sumatra*

PENDAHULUAN

Pada masa awal kemerdekaan, sistem keuangan di Sumatera Selatan mengalami ketidakstabilan akibat keterbatasan distribusi Oeang Republik Indonesia (ORI) dan juga terbatasnya Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS). Sebagai mata uang yang diterbitkan secara khusus untuk wilayah Sumatera, URIPS diharapkan mampu menggantikan mata uang asing yang masih beredar, seperti mata uang Jepang dan Gulden NICA. Namun, dalam praktiknya, URIPS tidak mampu sepenuhnya mengendalikan peredaran uang di Sumatera Selatan. Salah satu penyebab utamanya adalah luasnya wilayah administrasi dan keterbatasan logistik dalam mendistribusikan mata uang ini secara merata ke seluruh daerah. Akibatnya, di beberapa wilayah, masyarakat tetap menggunakan mata uang lama karena URIPS sulit didapatkan.

Dalam situasi yang semakin mendesak, pemerintah daerah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) sebagai upaya penyelamatan ekonomi. Mata uang ini dicetak dengan cap resmi dari otoritas lokal agar diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan dalam bertransaksi sehari-hari. Selain itu, terdapat mata uang CETAK TINDIH dengan memanfaatkan mata yang ada untuk digunakan sebagai mata uang alternatif. Penggunaan mata uang cetak tindih, dari mata uang dari daerah lain kemudian diberi cap atau ditindih dengan tulisan baru untuk menandakan bahwa uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam sebuah daerah tertentu sebagai solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan uang tunai akibat perang dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.

Faktanya, Belanda menerapkan strategi lama untuk merebut kendali atas Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Setelah drg. M. Isa sebagai Gubernur Muda Sub Propinsi Sumatera Selatan mengungsi ke luar kota, Palembang dijadikan pusat pemerintahan negara boneka bentukan Belanda yang dipimpin oleh Abdul Malik, bernama Negara Sumatera Selatan (NSS). Eskalasi konflik tidak hanya terjadi dalam ranah fisik dan politik, tetapi juga meluas ke persaingan legalitas pemerintahan, termasuk dalam aspek ekonomi, seperti penyebaran dan penggunaan alat tukar dalam transaksi sehari-hari. Setahun sebelumnya, pemerintah pusat telah menginisiasi pencetakan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan uang tunai di berbagai wilayah. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tanggal 26 Agustus 1947, yang memberikan wewenang kepada

pemerintah daerah untuk menerbitkan alat pembayaran yang sah di wilayah masing-masing (Pramasto and Anugrah, 2017:3). ORIDA diterbitkan oleh pemerintah Sumatera Selatan dicetak diberbagai karesidenan dan kewedanaan, termasuk di Palembang, Pagaralam, Lintang IV Lawang, dan beberapa daerah lain di Sumatera Selatan termasuk unsur militer. Dengan adanya ORIDA, kelangkaan uang di wilayah Sumatera Selatan dapat teratasi, dan perekonomian masyarakat tetap berjalan meskipun sistem keuangan nasional masih dalam tahap penyesuaian.

Peran ORIDA dalam menyelamatkan perekonomian Sumatera Selatan menjadi bukti bagaimana pemerintah daerah beradaptasi dalam menghadapi krisis moneter pada masa revolusi. Meskipun bersifat sementara, ORIDA menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan stabilitas ekonomi sebelum akhirnya sistem keuangan nasional kembali disatukan pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, yang menandai berakhirnya penggunaan mata uang daerah dan kembalinya sistem moneter di bawah kendali pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas peran ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) dalam perekonomian Sumatera Selatan selama Revolusi Fisik 1945-1949. Permasalahan yang dikaji meliputi latar belakang penerbitan ORIDA di Sumatera Selatan serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian dan stabilitas keuangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang penerbitan ORIDA di Sumatera Selatan dalam konteks perjuangan ekonomi selama Revolusi Fisik 1945-1949 serta mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian Sumatera Selatan, khususnya dalam menghadapi situasi ekonomi dan politik pada masa itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, setelah memilih topik, dilanjutkan dengan tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1995:69). Tahap pertama, heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, penelitian ini menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkaya analisis. Tahap kedua, kritik sumber, bertujuan untuk menilai keabsahan dan kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen, sementara kritik internal digunakan untuk memahami isi dan konteks sumber secara lebih mendalam. Tahap ketiga, interpretasi, dilakukan dengan menganalisis data sejarah yang telah dikritisi untuk memahami hubungan sebab-akibat serta peran ORIDA dalam perekonomian Sumatera Selatan selama Revolusi Fisik. Analisis ini juga mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi penggunaan ORIDA. Tahap terakhir, historiografi, adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan

objektif. Dalam tahap ini, seluruh temuan dikompilasi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang, kebijakan, serta dampak penggunaan ORIDA terhadap perekonomian Sumatera Selatan pada periode 1945-1949.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Ekonomi dan Keuangan Di Indonesia

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang keuangan, khususnya terkait alat tukar baru, mulai diatur setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pemerintah secara resmi melegalkan *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) sebagai mata uang nasional, yang sebagian besar beredar di Pulau Jawa. Legalisasi ORI didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Kemudian, Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 yang mengatur dasar penukaran uang Rupiah Jepang yang masih berlaku di Indonesia pada saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Lima puluh rupiah uang Jepang disetarakan dengan satu rupiah ORI;
b) Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang setara dengan satu rupiah ORI.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran ORI lebih diprioritaskan di Jawa dan Madura dibandingkan daerah lain, termasuk Sumatera walaupun relatif dekat. Selain itu, upaya Belanda dalam melancarkan aksi militernya di Jawa turut memengaruhi stabilitas ekonomi dengan memberlakukan ‘Uang NICA’ atau ‘Gulden NICA’. Taktik Belanda dalam peredaran uang, yaitu dengan menginstruksikan para tengkulak membeli berbagai kebutuhan seperti makanan, sayur, dan hewan dari daerah Republik menggunakan ORI yang tidak memiliki nilai di wilayah pendudukan Belanda. Namun, ketika rakyat ingin membeli barang di daerah pendudukan Belanda, mereka harus menukarkan ORI dengan Rupiah Belanda. Strategi ini membuat Belanda dapat membeli barang kebutuhan dari Republik dengan harga murah, sementara menjualnya kembali dengan harga tinggi, ini menyebabkan nilai ORI terus merosot dan harga kebutuhan pokok rakyat semakin melambung. Maka pemerintah Indonesia mulai melakukan propaganda yang menyerukan penggunaan ORI. Poster pertama bertuliskan “*Adja nampa duwit NICA (Jangan menyimpan uang NICA)*”, sedangkan poster kedua berbunyi "*Sdr*.2 Tionghoa, Ekonomi di tangan sdr.2, hargailah uang O.R.I. *Gerilja Waspada*” (Pramasto and Anugrah, 2017:2). Semua mata uang NICA ini menampilkan gambar Ratu Belanda, Wilhelmina dan ditandatangani oleh H.J. van Mook sebagai Pejabat Gubernur Jenderal dan Presiden De Javasche Bank, R.E. Smits.

Setelah melewati proses panjang dan berat karena dicetak dalam kondisi yang penuh keterbatasan, akhirnya pada 30 Oktober 1946 ORI resmi menjadi alat pembayaran yang sah bagi rakyat Indonesia. Namun, perjuangan tidak berhenti sampai disana. Kali ini yang menjadi tantangan adalah proses distribusinya, mengingat wilayah Indonesia sangat luas, transportasi belum memadai, dan masih ada beberapa daerah

yang dikuasai Belanda dan sekutu. Di awal kemunculan ORI, mata uang Jepang masih banyak digunakan di Sumatera dengan jumlah peredaran yang masih tinggi. Akibatnya, terjadi inflasi di Sumatera. Nilai mata uang terus merosot dan harga barang kebutuhan masyarakat melambung tinggi. Setelah dilakukan investigasi, peristiwa ini terjadi karena ada campur tangan pihak Belanda dan sekutu. Mereka mendapatkan klise uang ini sehingga bisa dengan leluasa mencetak dan menyebarluaskannya ke berbagai tempat di Sumatera (Harsono and Suharti, 2020:72–73). Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Propinsi Sumatra, Mr. Teuku Muhammad Hasan, mengeluarkan Maklumat No. 20/MGS pada 2 Desember 1946. Maklumat ini mengumumkan bahwa *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) resmi berlaku sebagai alat tukar yang sah, dengan nilai tukar satu rupiah ORI setara dengan seratus rupiah uang Jepang.

B. Penerbitan Mata Uang dalam Perjuangan Di Sumatera Selatan

1. Penerbitan Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS) Selatan

Penggunaan *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) ternyata belum mampu mengatasi masalah keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatra. Pada awal tahun 1947, anggaran belanja untuk gaji pegawai dan biaya perjuangan sudah tidak terpenuhi karena kas negara tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan pemerintah. Upaya meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat untuk mengirimkan ORI juga tidak membuahkan hasil. Akibatnya, Gubernur Sumatera sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan, meminta pertimbangan kepada Menteri Keuangan RI, Mr. Syafruddin Prawiranegara, agar Pemerintah Provinsi Sumatra diberikan izin untuk mencetak uang sendiri.

Merespon permintaan ini, Syafruddin memberikan usul agar Sumatera mencetak *promosse* atau “Surat Janji”. Namun, Hasan memiliki pandangan lain. Menurutnya, uang kertas akan jauh lebih efektif daripada *promosse*. Setelah melakukan diskusi panjang, akhirnya T. M. Hasan memutuskan mencetak uang kertas yang disebut URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) dan diberlakukan pada 11 April 1947 melalui Maklumat No. 92/KO (Harsono and Suharti, 2020:73–74). URIPS ditandatangani oleh Direktur Bank Negara Indonesia, R.M. Herman di Pematang Siantar dan Kepala Jabatan Keuangan Provinsi Sumatera, R. M. Amin, serta disahkan oleh Gubernur Sumatra, Mr. Teuku Muhammad Hasan. Nilai tukar satu rupiah URIPS ditetapkan setara dengan satu rupiah ORI atau seratus rupiah uang Jepang. Selanjutnya, Mr. Teuku Muhammad Hasan menetapkan Bank Negara Indonesia sebagai bank milik pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946.

Tabel 1. Mata uang yang diterbitkan pemerintah Propinsi Sumatera untuk digunakan di wilayah Sub Propinsi Sumatera Selatan (URIPSS)

No.	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda Tangan
1.	1 Rupiah	Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS) Selatan	Bukit Tinggi, 1 Januari 1948	Mr. T. M. Hasan (Gubernur Sumatera)
2.	2 ½ Rupiah	Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS) Selatan	Bukit Tinggi, 1 Januari 1948	Mr. T. M. Hasan (Gubernur Sumatera)
3.	10 Rupiah	Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS) Selatan	Bukit Tinggi, 1 Januari 1948	Mr. T. M. Hasan (Gubernur Sumatera)

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:138-150

Gambar 1. URIPS Rp. 2 ½ berlaku untuk di Sub Propinsi Sumatera Selatan
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Negeri Bengkulu

Baik itu ORI di Sumatera maupun URIPS yang diterbitkan dalam berbagai pecahan dan beredar di Sumatera Selatan, dalam praktiknya mengalami kesulitan dalam mengendalikan peredaran uang di wilayah ini karena distribusinya terbatas dan kurang merata. Kemudian di beberapa daerah, masyarakat masih ada menggunakan mata uang "Gulden NICA" karena lebih mudah didapatkan. Disisi lain, Belanda memang berupaya untuk kembali menguasai wilayah Indonesia melalui *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Sebagai bagian dari strategi ekonominya, Belanda menerbitkan mata uang Gulden NICA untuk menggantikan mata uang yang beredar selama pendudukan Jepang. Dalam praktiknya, Gulden NICA mulai diedarkan di wilayah-

wilayah yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Namun, di beberapa daerah, terutama yang dikuasai oleh Republik Indonesia, masyarakat menolak menggunakan Gulden NICA karena dianggap sebagai simbol kembalinya kekuasaan kolonial.

Setelah menggantikan posisi Inggris di Palembang sejak bulan Desember 1946, NICA mulai menyusun dan memperkuat pasukannya di Kota Palembang dan sekitarnya. Pemerintah NICA kemudian memberlakukan blokade ekonomi dan militer dengan menempatkan kapal-kapal perang di perairan pantai timur Sumatera, Selat Bangka, hingga Sungai Musi. Blokade ini bertujuan untuk mengisolasi wilayah-wilayah tersebut dengan mencegah lalu lintas pelayaran antara Palembang, Lampung, Jambi, dan Singapura. Akibatnya, hasil bumi, barang kebutuhan pokok, serta senjata tidak dapat diekspor maupun diimpor ke Singapura (Abubakar et al, 2020:168).

Gambar 2. Mata Uang NICA ‘Sepoeloeh Roepiah’
Sumber: Historia.ID

Penggunaan kata *‘Roepiah’* atau Rupiah pada uang NICA merupakan usaha Belanda mendapatkan perhatian rakyat Indonesia. Selain dihadapkan dengan beredarnya uang NICA, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan beredarnya uang palsu. Karena Belanda terus berusaha kembali menguasai Indonesia dengan melakukan berbagai upaya untuk melemahkan ekonomi Republik, termasuk perang uang (*currency war*). Salah satu caranya adalah dengan memalsukan ORI yang bertujuan untuk menurunkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Republik. Pemalsuan mata uang kertas biasanya hasil cetakan sangat kasar dengan kertas yang lebih tipis dan ditemukan beberapa nomor seri.

2. *Oeang Repoeblik* Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera Selatan

Pemerintah pusat selalu menghadapi tantangan dalam mendistribusikan Oeang Republik Indonesia (ORI) ke seluruh wilayah, termasuk di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh blokade dan gangguan dari Belanda yang berusaha menghambat peredaran ORI. Sebagai respons, pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk mencetak mata uang sendiri yang dikenal sebagai Oeang Republik Indonesia Daerah

(ORIDA). Oleh karena itu, dikatakan bahwa pemerintah Propinsi Sumatera selain menerbitkan URIPS, pemerintah daerah juga menerbitkan ORIDA termasuk di Propinsi Sumatera Selatan membawahi Karesidenan Palembang, dibawahnya terdapat Kawedanaan-Kawedanaan.

Baik URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) maupun ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah) adalah mata uang yang diterbitkan pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945- 1949) sebagai solusi terhadap kelangkaan uang tunai akibat blockade ekonomi Belanda. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya.

Tabel 2. Perbedaan URIPS dan ORIDA di Indonesia

Aspek	URIPS	ORIDA
Wilayah Penerbitan	Hanya diterbitkan di Provinsi Sumatera sebagai satu kesatuan administratif	Diterbitkan oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatera
Penerbit	Pemerintah Propinsi Sumatera dibawah Gubernur Sumatera	Pemerintah daerah tingkat Propinsi,Karesidenan, Kabupaten/Kota, Kawedanaan, atau Militer
Dasar Hukum	Maklumat Gubernur Sumatera No. 92/K.O tanggal 8 April 1947	Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tanggal 26 Oktober 1947
Nominal yang Diterbitkan	Rp. 1, Rp. 2 ½ , Rp. 10	Bervariasi sesuai daerah, misalnya di Curup Rp. 40, di Empat Lawang Rp. 10, di Pagaralam Rp. 1000, dan lain-lain
Masa Edar	Diterbitkan pada April 1947 dan beredar hingga sekitar 1949	Bervariasi tergantung daerah dan kebutuhan ekonomi lokal
Tujuan Penerbitan	Mengatasi kelangkaan uang ORI di Sumatera secara keseluruhan	Menyediakan alat tukar di daerah yang tidak terjangkau ORI atau URIPS
Cakupan Wilayah Penggunaan	Berlaku di seluruh Sumatera. Namun terdapat juga diterbitkan yang hanya berlaku di Sub Propinsi Sumatera Selatan	Berlaku di daerah masing-masing dan tidak selalu diterima di luar wilayah penerbitannya
Ciri Fisik	Dicetak dengan desainlebih seragam dan kualitas lebih baik dibanding ORIDA daerah tertentu	Biasanya dicetak dengan teknologi sederhana, sering kali menggunakan kertas dan tinta seadanya

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa URIPS adalah bagian dari ORIDA, tetapi khusus diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera dan berlaku untuk seluruh Sumatera. URIPS memiliki cakupan lebih luas dibanding ORIDA Curup, Empat Lawang, dan Pagaralam yang hanya berlaku di wilayah masing-masing. Dengan demikian, URIPS bisa dianggap sebagai ORIDA yang lebih terorganisir dan memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan ORIDA daerah lainnya.

Dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947, pemerintah daerah Sub Propinsi Sumatra Selatan mencetak ORIDA yang diedarkan di wilayah masing-masing. Hal tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi pemerintah di daerah-daerah membuat kebijakan dengan melakukan penerbitan mata uang yang disebut Uang Mandat (Abubakar et al, 2020:173). Mata uang ini diterbitkan oleh Dewan Pertahanan Daerah (DPD), merupakan salah satu bentuk Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap kelangkaan mata uang dan upaya menjaga stabilitas ekonomi selama mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan utama DPD adalah mengatur strategi pertahanan daerah dalam menghadapi agresi pasukan militer Belanda serta memastikan stabilitas ekonomi dan politik di suatu wilayah.

Ciri-ciri mata uang mandat, selain diterbitkan oleh Dewan Pertahanan Daerah, dicetak juga secara sederhana, sering kali menggunakan bahan dan teknik seadanya. Dan beredar dalam wilayah terbatas dan hanya berlaku sementara, serta ditandatangani oleh pejabat daerah setempat.

Tabel 3. Mata uang yang diterbitkan Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP) dikeluarkan pemerintah Karesidenan Palembang

No	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda Tangan
1	50 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	1 Agustus 1947	Abdul Rozak (Residen Palembang)
2	100 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	1 Agustus 1947	Abdul Rozak (Residen Palembang)
3	250 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	1 Agustus 1947	Abdul Rozak (Residen Palembang)
4	1000 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	1 Agustus 1947	Abdul Rozak (Residen Palembang)

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:304-312

Gambar 3. ORIDA Mandat DPDP Rp.1000 berlaku di Karesidenan Palembang
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Selain penerbitan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) oleh pemerintah sipil di daerah tertentu, tetapi juga dilakukan oleh pihak militer. Hal ini disebabkan karena kondisi darurat yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan, terutama akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dan keterbatasan distribusi Oeang Republik Indonesia (ORI) dan juga Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS) Selatan. Dalam situasi ini, keberlanjutan roda ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan mata uang yang dapat digunakan alat pembayaran. Oleh karena itu, baik pemerintah daerah maupun unsur militer di berbagai wilayah turut berperan dalam menerbitkan ORIDA sebagai solusi alternatif.

Di Sumatera Selatan, terkhusus untuk wilayah Karesidenan Palembang bahwa penerbitan ORIDA dilakukan oleh unsur militer militer Brigade Garuda Dempo dipimpin Letnan Kolonel Harun Sohar. Keterlibatan militer dalam penerbitan uang ini didorong oleh beberapa faktor utama antara lain:

a) Menjaga Stabilitas Ekonomi di Wilayah Perjuangan
   Pada masa revolusi, wilayah-wilayah di bawah kendali militer sering kali mengalami keterbatasan dalam pengadaan mata uang. Untuk memastikan masyarakat tetap dapat melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi berjalan lancar, satuan militer yang memiliki otoritas di wilayahnya menerbitkan uang sendiri.
b) Mendukung Logistik dan Operasional Perang
   Militer memerlukan dana untuk membiayai operasionalnya, termasuk kebutuhan logistik, perbekalan, dan gaji tentara. Karena pemerintah pusat kesulitan mengirimkan distribusi mata uang akibat blokade Belanda dan pertempuran yang terus berlangsung, sehingga penerbitan ORIDA menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
c) Mengurangi Ketergantungan pada Mata Uang Kolonial
   Dengan menerbitkan ORIDA, baik pemerintah daerah maupun militer ingin mengurangi penggunaan mata uang yang dikeluarkan oleh pihak Belanda, seperti Gulden NICA yang masih beredar di beberapa daerah. Penerbitan uang ini juga

menjadi bentuk perlawanan terhadap upaya Belanda menguasai kembali sistem moneter Indonesia.

d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Republik
Penerbitan ORIDA oleh unsur militer menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dalam aspek militer, tetapi juga dalam sektor ekonomi. Dengan adanya uang yang dikeluarkan oleh unsur militer, masyarakat tetap memiliki alat tukar yang sah dan tetap loyal terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

Brigade Garuda Dempo merupakan satuan militer yang memiliki wilayah teritorial di Pagaralam, brigade ini merupakan bagian dari Divisi VIII/Garuda yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1947. Divisi VIII/Garuda ini bertanggung jawab atas pertahanan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, bermarkas di Lahat (menempati gedung *Juliana Hospital*). Divisi ini awalnya dipimpin oleh Kolonel Hasan Kasim, sebelum kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Harun Sohar (Susetyo and Ravico, 2021:120–21). Brigade Garuda Dempo baru dibentuk pada tanggal 1 Juni 1947 setelah Divisi VIII/Garuda melakukan reorganisasi struktur organisasinya. Divisi VIII/Garuda awalnya terdiri atas Batalyon Tempur Garuda Merah, membawahi: Brigade Pertempuran Garuda Merah di Prabumulih, Resimen 41 di Tanjung Karang, Resimen 42 di Bengkulu, dan Resimen 43 di Jambi. Setelah dilakukan reorganisasi, maka Divisi VIII/Garuda membawahi lima brigade, salah satunya ialah Brigade Garuda Dempo yang juga berperan menerbitkan mata uang sendiri untuk wilayah Pagaralam.

Tabel 4. Mata uang yang diterbitkan militer Bridge Garuda Dempo

No.	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda Tangan
1.	Cheque 10 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	Pagaralam, 17 Desember 1947	Letnan Kolonel Harun Sohar (Komandan Bridge Garuda Dempo)
2.	Cheque 50 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	Pagaralam, 17 Desember 1947	Letnan Kolonel Harun Sohar (Komandan Bridge Garuda Dempo)

3.	Cheque 100 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	Pagaralam, 17 Desember 1947	Letnan Kolonel Harun Sohar (Komandan Bridge Garuda Dempo)
4.	Cheque 150 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	Pagaralam, 17 Desember 1947	Letnan Kolonel Harun Sohar (Komandan Bridge Garuda Dempo)
5.	Cheque 1000 Rupiah Jepang	ORIDA Sumatera Selatan	Pagaralam, 17 Desember 1947	Letnan Kolonel Harun Sohar (Komandan Bridge Garuda Dempo)

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:301-303

Gambar 4. ORIDA Rp.1000 berlaku di Pagaralam
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Keberadaan Divisi VIII/Garuda berkedudukan di Lahat, bukan tanpa alasan. Setelah terjadi peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam di Kota Palembang tanggal 1-5 Januari 1947, dalam perundingan gencatan senjata dengan Belanda disebutkan bahwa unsur militer diharuskan meninggalkan Kota Palembang. Sehingga memilih Lahat sebagai kedudukan selanjutnya. Ketika masih bermarkas di Kota Palembang, Divisi VIII/Garuda sebelumnya bernama SUBKOSS (Sub Komandemen Sumatera Selatan) terdiri Divisi I Garuda Lahat dan Divisi II Garuda

Palembang, yang berjuang menghadapi pasukan Belanda saat terjadi Perang 5 Hari 5 Malam yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon. Alhasil, pasukan militer termasuk juga pemerintahan sipil Sumatera Selatan ini bergerilya secara mobil (berpindah-pindah).

Pada perkembangan selanjutnya, Curup dijadikan ibukota sementara Sub Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena peristiwa penangkapan drg. M. Isa sebagai Gubernur Muda Sumatera Selatan oleh Belanda pada 13 Desember 1947. Setelah ditahan selama kurang lebih satu minggu (13-20 Desember 1947), ia akhirnya dibebaskan dan melanjutkan perjuangannya di luar Kota Palembang. Sebelumnya, jajaran pemerintahan Karesidenan Palembang telah meninggalkan kota Palembang setelah gencatan senjata pasca Perang Lima Hari Lima Malam tersebut, dan memilih Lubuk Linggau sebagai pusat keresidenan yang baru. Sejalan dengan itu, pemerintahan tingkat Sub Provinsi memindahkan ibukotanya ke Curup setelah keluarnya drg. M. Isa dari Kota Palembang (Pramasto and Anugrah, 2017:2–3).

Oleh karena itu, Lubuk Linggau dan Curup berfungsi sebagai pusat pemerintahan darurat ketika Palembang jatuh ke tangan Belanda. Pemilihan kedua kota tersebut dinilai strategis karena letaknya yang terpisah, sehingga jika salah satu dikuasai Belanda, masih ada pusat pemerintahan lain yang tetap berwenang. Dengan bergabungnya Karesidenan Palembang dan militer Divisi VIII/Garuda di Lubuk Linggau, serta Sub Propinsi Sumatera Selatan berada di Curup menjadikan perjuangan mempertahankan wilayah Sumatera Selatan menjadi semakin solid. Keinginan Belanda untuk menguasai Sumatera Selatan secara cepat mengalami kesulitan. Pemerintahan sipil dan militer selalu berkoordinasi dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan RI, apalagi jarak Curup dan Lubuk Linggau yang tak terlalu jauh (Susetyo and R. Ravico, 2021:24–25; Zed, 1997:104–5).

Selain uang kertas, pemerintah Sumatra Selatan juga menerbitkan beberapa jenis mata uang lainnya, salah satunya adalah mata uang berbentuk bon yang dikenal sebagai 'uang bon.' Mata uang ini disebut juga Bon Beras dan diberlakukan hanya di wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1948. Bon ini dapat ditukarkan dengan Uang yang berlaku pada saat itu menurut harga yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Komandan SUBKOSS (Sub Komandemen Sumatera Selatan) yakni Kolonel Maludin Simbolon berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan pada 19 Desember 1948 (Tim Penyusun, 2010:90).

Bon Beras.

Serie: A
No: 10720

(Ketetapan G.S.S. 19-12-'48)

Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan menanggung akan membajar kepada jang memegang bon ini harga beras sebanjak 5 kg. dengan mata uang jang berlaku pada sa'at pembajarannja menurut harga jang akan ditentukan.
Bon ini berlaku dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Tanda tangan
jang terima beras,

Tanggal

Komandan Sub. Koss.

M. Simbolon

Bon Beras.

Serie B
No 27102

(Ketetapan G.S.S. 19-12-'48)

Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan menanggung akan membajar kepada jang memegang bon ini harga beras sebanjak 10 kg dengan mata uang jang berlaku pada sa'at pembajarannja menurut harga jang akan ditentukan.
Bon ini berlaku dalam daerah Propinsi Sumatera Selatan

Tanda tangan
jang terima beras,

Tanggal

Komandan Sub Koss

M. Simbolon

Gambar 5. Bon Beras 5 kg; dan **Gambar 6**. Bon Beras 10 kg
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Seperti diketahui, bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan peristiwa Agresi Militer Belanda II yang menyerang wilayah Indonesia secara serentak. Kala itu, Lubuk Linggau merupakan salah satu dari tiga kota utama yang menjadi sasaran serangan serentak tersebut, bersama-sama dengan Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Tujuannya untuk menghapus peta ketatanegaraan Republik, dengan cara menguasai ibukota secepatnya dan menangkap para pemimpinnya. Dengan begitu, Belanda dapat meneruskan rencana untuk mendirikan negara federal ciptaannya sendiri (Rizal, 2021:15–16; Zed, 1997:72). Mengapa tiga kota yang diserang serentak? Karena Yogyakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia, Bukittinggi juga pusat pemerintahan Propinsi Sumatera dipimpin Gubernur Sumatera serta kedudukan militer Komando Tentara dan Teritorium Sumatera dipimpin Kolonel Hidayat, sedangkan Lubuk Linggau ialah markas militer SUBKOSS (Sub Komandemen Sumatera Selatan) dipimpin Kolonel M. Simbolon. Dengan melumpuhkan kekuatan militer maka Belanda dengan leluasa dapat menguasai tambang minyak, batu bara, emas dan *onderneming*: kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kina. Tak seorangpun dapat membantah bahwa Sumatera Selatan adalah sumber kekayaan bumi yang melimpah, karena itu Belanda harus menghancurkan SUBKOSS agar dapat aman menguasainya (AC. Bawaihi, 1988; Rasjid, 1982:10–11). Namun apa yang diperoleh tak sesuai harapan Belanda, karena semua itu dibumihanguskan oleh Republik.

Kepentingan Belanda untuk menduduki Lubuk Linggau khususnya dilandasi pertimbangan ekonomi. Kota ini sudah lama disinyalir Belanda sebagai pumpunan minyak Palembang (adanya PERMIRI/Perusahaan Minyak Republik Indonesia) dan hasil-hasil perkebunan Sumatera Selatan yang kaya kemudian disalurkan ke Jambi dan dari sana sebagian terus ke Sumatera Barat dan sebagian lain ke Singapura. Perdagangan smokel (penyelundup) seperti Karet, Kopi, Kopra, Timah dan lain-lain, dengan menerobos blokade laut Belanda untuk kepentingan biaya perjuangan TNI berkembang sangat subur. Lagi pula, Belanda sangat terganggu dengan kegigihan Lubuk Linggau dalam menggagalkan

propaganda Belanda yang sebelumnya telah berhasil mendirikan negara Federal ciptaan Van Mook (Negara Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik). Karena sejak Perang 5 Hari 5 Malam, Kota Palembang telah dikuasai Belanda; begitupun Lahat telah dikuasai Belanda sejak Agresi Militer Belanda I. Sejak saat itu, seluruh unsur pemerintah sipil dan militer RI di Sumatera Selatan berada di Lubuk Linggau (Mursal and Bakaruddin, 2020:223; Zed, 1997:171–72).

Selama di Curup, drg. Moh. Isa sebagai Gubernur Sumatera Selatan dengan dukungan staf dan prajurit militer berupaya maksimal agar roda pemerintahan sipil Propinsi tetap berjalan. Ketika khas sedang kosong sehingga roda pemerintahan tersendat. Moh. Isa segera mengambil inisatif mencetak uang kertas ORIDA dengan nominal Rp. 40. Percetakan uang dilakukan dengan cara memanfaatkan alat-alat cetak sederhana, kertas, dan tinta seadanya yang dibawa serta para staf saat mengungsi. Mata uang itu dicetak di sebuah rumah berlantai dua di Jalan Pasar Tengah, Curup, milik tokoh setempat bernama Sanusi Chan. Dalam keadaan darurat itu, keberadaan mata uang ini sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah amatlah penting. Para pejuang dapat membelanjakan uang itu untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya (Yuarsa, 2016:78–79).

Tabel 5. Mata uang yang diterbitkan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan

No.	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda Tangan
1.	40 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	Curup, 1 Januari 1949	drg. Moh. Isa (Gubernur Sumatera Selatan)

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:438

Gambar 7. ORIDA Rp. 40 berlaku di Sumatera Selatan
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Setelah peristiwa Agresi Militer Belanda II tersebut, dan ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, secara tidak langsung Republik Indonesia menjadi lumpuh. Untuk meneruskan pemerintahan sementara, maka dibentuklah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 dipimpin Mr. Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Sesuai dengan sifatnya, PDRI sebagai pemerintahan yang bersifat ‘mobil’ dalam periode perang gerilya. Artinya suatu pemerintahan yang ‘bergerak’ atau berpindah-pindah tempat (Zed, 1997:104–5).

Sejak saat itu, wilayah yang ada di Propinsi Sumatera dijadikan pemerintahan militer dibawah PDRI. Sehingga perjuangan mesti menyatukan menjadi satu komando, maka unsur pemerintahan sipil dan militer disatukan menjadi ‘Daerah Militer’. Di Sumatera Selatan, dibentuk Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS) dan mengangkat Adnan Kapau Gani sebagai Gubernur Militer dan Wakil Gubernur Militer ialah Kolonel M. Simbolon. Sementara jabatan Gubernur Sumatera Selatan, setelah ada Gubernur Militer maka diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat (KOMPEMPUS) untuk Sumatera Selatan, drg. M. Isa menduduki jabatan tersebut. Kemudian pada tingkat di bawahnya seperti Kabupaten, Kawedanaan dan lain-lain diangkat Bupati Militer, Wedana Militer, dan lain-lain. Misalnya, untuk Kabupaten Musi Ulu Rawas, dijabat oleh Bupati Militer Mohammad Hasan (Rasjid, 1982:24–26; Susetyo, Wahayuni, and Kusmalwati, 2022:118).

Selama menjadi Gubernur Militer, A.K. Gani dalam memimpin DMISS berpindah-pindah tempat untuk menghindari penyergapan Belanda, mulai dari Muara Aman-Tabaatas lalu di Lebong Tandai. Selain memikirkan bagaimana upaya untuk tetap menjaga moralitas pasukan TNI dan rakyat dari serangan Belanda, juga harus membuat kebijakan di bidang keuangan. Hal ini diperlukan karena operasional DMISS memerlukan dana (Yusuf et al. 2020:47–48).

Tabel . Mata uang yang diterbitkan pemerintah Daerah militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS)

No	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda tangan
1	20 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	Bukit Barisan, 1 Mei 1949	Adnan Kapau Gani (Gubermir Militer DMIIS)

Sumber: Harsono & Suharti, 2020: 199-201

Gambar 8. ORIDA Rp. 20 berlaku di Sumatera Selatan
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Penerbitan *Oeang* Republik Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera Selatan tidak hanya dilakukan secara terpisah oleh pemerintah sipil daerah dan militer, tetapi dalam beberapa kebijakan juga dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya koordinasi antara otoritas sipil dan militer dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi darurat perang. Sebagai contoh penting dari penerbitan ORIDA bersama ini adalah mata uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Karesidenan Palembang dan Militer Sub Teritorial Palembang (STP) yang ditandatangani Residen Abdul Rozak dan Letnan Kolonel Bambang Utoyo (Tim Penyusun, 2010:90).

Tabel 7. Mata uang yang diterbitkan bersama oleh pemerintah Karesidenan Palembang dan militer Sub Teritorial Palembang (STP)

No	Nilai Mata	Kategori	Dicetak	Tanda Tangan
1.	Cheque 10 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	17 Januari 1949	Komandan Sub Teritorial Palembang (STP), Letnan Kolonel Bambang Utoyo dan Residen Palembang, Abdul Rozak
2.	Cheque 50 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	17 April 1949	Komandan Sub Teritorial Palembang (STP), Letnan Kolonel Bambang Utoyo dan Residen Palembang, Abdul Rozak

3.	Cheque 40 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	6 Juli 1949	Komandan Sub Teritorial Palembang (STP), Letnan Kolonel Bambang Utoyo dan Residen Palembang, Abdul Rozak
4.	Cheque 50 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	18 November 1949	Komandan Sub Teritorial Palembang (STP), Letnan Kolonel Bambang Utoyo dan

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:313-312

Gambar 9. ORIDA Rp. 50 dibuat Sersan Kadet Nelson Tobing di Ulu Musi (Nanjungan), Empat Lawang
Sumber: Dokumentasi Koleksi Museum Subkoss, Lubuk Linggau

Peran militer Sub Teritorial Palembang (STP) dalam penerbitan ini sangat penting, mengingat wilayah ini merupakan area strategis dalam pertahanan di wilayah Karesidenan Palembang. Dengan adanya ORIDA yang diterbitkan bersama, militer dapat memastikan bahwa mata uang tersebut diakui di seluruh wilayah yang berada di bawah kendali mereka, termasuk untuk kebutuhan logistik, operasional pasukan, dan transaksi ekonomi di daerah perjuangan. Sub Teritorial Palembang (STP) merupakan komando militer di bawah kendali SUBKOSS yang berkedudukan di Muara Beliti dipimpin Letnan Kolonel Bambang Utoyo dan mempertahankan wilayah teritorial Karesidenan Palembang.

Selanjutnya, terdapat juga mata uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kewedanaan Lintang IV Lawang dan Batalyon 38. Di Kewedanaan Lintang IV Lawang, penerbitan ORIDA dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah sipil dan militer, dalam hal ini Batalyon 38. Penerbitan uang ini menegaskan bahwa daerah yang masih

dalam kondisi perang memerlukan sistem moneter yang fleksibel dan mampu menopang ekonomi masyarakat serta kebutuhan militer.

Tabel 8. Mata uang yang diterbitkan pemerintah Kewedanan Lintang IV Lawang dan militer Batalyon 38

No	Nilai Mata Uang	Kategori	Dicetak	Tanda tangan
1	Cheque 10 Rupiah	ORIDA Sumatera Selatan	Pendopo, 17 Januari 1949	Komandan Batalyon 38, Kapten A. Baidjuri dan Wedana Lintang IV Lawang, A. Sani

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:271-272

Gambar 10. ORIDA Rp.10 berlaku di Kewedanan Lintang IV Lawang

Sumber: Harsono & Suharti, 2020:271-271

Batalyon 38 merupakan Batalyon Organik langsung di bawah komando Panglima SUBKOSS (Sub Komandemen Sumatera Selatan). Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa militer SUBKOSS setelah Perang 5 Hari 5 Malam dan juga peristiwa Agresi Militer Belanda I ini kemudian bermarkas di Lubuk Linggau. Namun setelah pemerintah RI melakukan kebijakan RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi), jika sebelumnya masih bernama Divisi VIII/Garuda saat di Lahat akhirnya kembali dinamakan SUBKOSS di Lubuk Linggau pada Juni 1948. Namun kali ini, membawahi empat Sub Teritorial (Djambi, Bengkulu, Lampung dan Palembang).

Pembentukan Batalyon 38 ini tidak lepas dari kebijakan Dekrit Presiden tentang integrasi TRI dan Laskar Rakyat menjadi TNI, maka Divisi VIIII/Garuda (diubah jadi SUBKOSS nanti) melakukan pembentukan batalyon baru, selain Batalyon 38 dipimpin Kapten A. Baidjuri; terdapat Batalyon 36 dipimpin Kapten Abi Hasan Said. Apabila

pembentukan Batalyon 36 dengan meleburkan TRI dan Laskar Napindo, Pesindo, KRIS menjadi TNI pada Oktober 1947, sementara Batalyon 38 dengan meleburkan TRI dan Laskar Hizbullah menjadi TNI pada November 1947 (Susetyo and Ravico, 2021:122–23).

Dengan ditandatangani oleh Wedana Lintang IV Lawang dan Komandan Batalyon 38, ORIDA yang diterbitkan di wilayah ini mendapat pengakuan resmi baik dari otoritas pemerintahan maupun militer. Hal ini penting karena dalam situasi perang, kepercayaan terhadap mata uang menjadi faktor utama agar dapat digunakan secara luas. ORIDA ini memungkinkan transaksi lokal tetap berjalan, baik untuk kepentingan rakyat maupun untuk mendukung operasional pasukan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

C. Penggunaan ORI menjadi Mata Uang Cetak Tindih

Mata uang cetak tindih adalah mata uang dari daerah lain yang diberi cap atau ditindih dengan tulisan baru untuk menandakan bahwa uang tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam sebuah daerah tertentu sebagai solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan uang tunai akibat perang dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.

Gambar 11. Mata Uang Rp. 50 Bukittinggi Cetak Tindih Karesidenan Palembang

Alasan mengapa mata uang cetak tindih digunakan? Karena distribusi mata uang sebagai alat pembayaran sangat terbatas. Kemudian situasi ekonomi di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Karesidenan Palembang juga mengalami ketidakstabilan akibat blokade ekonomi Belanda dan terbatasnya distribusi Oeang Republik Indonesia (ORI) dan juga terbatasnya Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Dalam kondisi sulit tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah darurat dengan menggunakan mata uang cetak tindih, yaitu uang dari daerah lain yang diberi cap resmi agar tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah. Dibawah kepemimpinan Residen Palembang, Abdul Rozak, mata uang cetak tindih digunakan untuk menjaga

kelangsungan transaksi ekonomi di wilayah tersebut. Mata uang yang digunakan dalam cetak tindih ini berasal dari URIPS, antara lain: 10 Rupiah Pematangsiantar, 25 Rupiah Bukit Tinggi, dan 50 Rupiah Bukit Tinggi. Setiap lembar uang ini diberi cap khusus atas nama Residen Abdul Rozak, menandakan bahwa uang tersebut diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Karesidenan Palembang. Langkah ini diambil karena keterbatasan ORIDA dan sebagai bentuk ketegasan bahwa perekonomian di Palembang tetap berada di bawah kendali Republik (Harsono and Suharti, 2020:321).

Di wilayah Kewedanaan Lintang IV Lawang juga menghadapi tantangan ekonomi akibat kelangkaan ORIDA ini. Dibawah otoritas Wedana Lintang IV Lawang, A. Sani, mata uang cetak tindih mulai diberlakukan. Beberapa pecahan mata uang yang digunakan dalam cetak tindih meliputi: 5 Rupiah Pematangsiantar, 10 Rupiah Pematangsiantar, 25 Rupiah Bukit Tinggi, dan 50 Rupiah Bukit Tinggi. Pada lembar mata uang ini diberi cap khusus atas nama Wedana A. Sani, yang menandakan keabsahannya sebagai alat tukar di wilayah Lintang IV Lawang (Harsono and Suharti, 2020:273–75).

Selain itu, dalam upaya mempertahankan kestabilan ekonomi dan memastikan kelangsungan transaksi di daerah yang masih berada dalam situasi darurat akibat agresi militer Belanda II, Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS) turut mencetak tindih mata uang sebagai bentuk perlawanan ekonomi. Salah satu mata uang yang dicetak tindih oleh DMISS adalah 50 Rupiah Bukit Tinggi, yang diberi cap khusus untuk menandakan keabsahannya sebagai alat tukar yang sah di wilayah yang berada di bawah otoritas Pemerintah Darurat Republik Indonesia (Harsono and Suharti 2020:374). Selain itu, Kabupaten Pagaralam juga menerapkan kebijakan serupa dengan mencetak tindih mata uang bernilai 50 Rupiah, yang berfungsi sebagai alat tukar sah di wilayah tersebut (Harsono and Suharti, 2020:303).

Penggunaan mata uang cetak tindih di wilayah Sumatera Selatan ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara ekonomi tanpa harus bergantung pada mata uang asing atau mata uang yang diterbitkan oleh Belanda, yakni Gulden NICA. Langkah ini juga mencerminkan tekad kuat dari unsur sipil dan militer dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah situasi perang dan blokade ekonomi. Meskipun penggunaan mata uang cetak tindih bersifat sementara, kebijakan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mencegah ketergantungan pada mata uang asing yang berpotensi melemahkan perekonomian nasional. Seiring dengan mulai terkendalinya distribusi ORI dan semakin kuatnya sistem moneter Indonesia, mata uang cetak tindih secara bertahap dihentikan, menandai integrasi ekonomi daerah ke dalam sistem keuangan nasional yang lebih stabil dan terpusat.

KESIMPULAN

Penerbitan ORIDA (*Oeang Repoeblik* Indonesia Daerah) di Sumatera Selatan selama Revolusi Fisik 1945-1949 merupakan respons terhadap keterbatasan distribusi mata uang dari Jawa ke Sumatera akibat situasi perang dan blokade ekonomi oleh Belanda. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencetak mata uang sendiri guna menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi dan menopang perjuangan kemerdekaan. Penerbitan mata uang ini dilakukan oleh berbagai entitas, baik sipil maupun militer. Pemerintah sipil yang terlibat meliputi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Karesidenan Palembang, dan Kewedanaan Lintang IV Lawang, sedangkan dari pihak militer, ORIDA juga diterbitkan oleh Brigade Garuda Dempo dan Sub Teritorial Palembang. Keberadaan ORIDA memberikan dampak signifikan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi daerah, meskipun dalam praktiknya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti beredarnya mata uang NICA dan kendala dalam distribusi. Secara keseluruhan, penerbitan ORIDA di Sumatera Selatan menunjukkan bagaimana strategi moneter darurat dapat digunakan sebagai instrumen ekonomi dalam perjuangan kemerdekaan. Keberhasilan ORIDA dalam menopang perekonomian daerah selama periode Revolusi Fisik mencerminkan peran penting kebijakan ekonomi lokal dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi pada masa itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Arlyana, Rita Krisdiana, Usep Sukarya, Dedi Irwanto Muhammad Santun, Johannes Adiyanto, Rainci Maliati, Mirza Ardi Wibawa, and Allan Akbar. (2020). *‘OEDJAN MAS’ DI BUMI SRIWIJAYA BANK INDONESIA DAN ‘HERITAGE’ DI SUMATRA SELATAN*. Jakarta: BANK INDONESIA INSTITUTE.

AC. Bawaihi. (1988). “Lubuk Linggau Diserang Belanda.” *Srivijaya Post*.

Harsono, Suwito, and Michell Suharti. (2020). *ORIDA; Oeang Republik Indonesia Daerah 1947- 1949*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mursal, Irhas Fansuri, and Lagut Bakaruddin. (2020). “Lima Negara Bagian Terpenting Dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950.” *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2(2):217–30.

Pramasto, Arafah, and Sapta Anugrah. (2017). “ORIDA Curup : Menjaga Kedaulatan Mata Uang Era Kemerdekaan.” November 7.\

Rasjid, Mohammad. (1982). *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang.

Rizal. (2021). "PERAN JENDERAL SOEDIRMAN DALAM PERANG GRILIYA (Studi Historis Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949 Di Jawa Tengah)." *Danadyaksa Historica* 1(1):12–24. doi: 10.32502/jdh.v1i1.3593.

Susetyo, Berlian and Ravico. (2021). *Sejarah Lubuklinggau Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.

Susetyo, Berlian, and Ravico Ravico. (2021). "Kota Lubuklinggau Dalam Kurun Waktu 1825-1948."

Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah 10(1):14–29. doi: 10.36706/jc.v10i1.12902.

Susetyo, Berlian, Muhammad Wahayuni, and Eva Kusmalwati. (2022). "Mengungkap Sejarah Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer Kabupaten Musi Ulu Rawas Pada Masa Agresi Belanda II." *Danadyaksa Historica* 1(2):117. doi: 10.32502/jdh.v1i2.4245.

Tim Penyusun. (2010). *Bambang Utoyo: Jiwa Ragaku Untuk Negeri Tercinta*. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat.

Yuarsa, Feris. (2016). *Mohamad Isa: Pejuang Kemerdekaan Yang Visioner*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, Syafruddin, Kemas Ari Panji, Rita Nefrida, Dudy Oskandar, and Priyanti Gani. (2020). *Menelusuri Jejak Perjuangan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. A.K. Gani*. Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan.

Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Sejarah Yang Terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.